

Kejati Dianggap Pembohongan Publik

PONTIANAK. Pengakuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar yang menyatakan belum selesai mengaudit proyek air bersih Riam Mesarap, Kabupaten Ketapang mengejutkan banyak pihak. Pengakuan itu kian memunculkan opini ketidakberesan dalam perkara ini.

Anggota Komisi A DPRD Kalbar, N CH Saiyan SH MH mengkritik habis-habisan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Sebelum pengakuan BPKP, Kejati mengindikasikan audit sudah sampai pada tahap kesimpulan yang isinya menyatakan belum menemukan indikasi kerugian negara.

"Ini berarti Kejati sudah melakukan pembohongan publik," tegas Saiyan kepada Equator, Sabtu (25/6) sore.

Saiyan yang tergabung di Komisi Membedangi Hukum dan Pemerintahan ini mengaku cukup terkejut dengan pengakuan BPKP yang menyatakan audit proyek air bersih Riam Merasap belum tuntas alias masih dalam proses. "Ini kan berarti belum sampai ke kesimpulan. Kok Kejati sudah punya kesimpulan audit," herannya.

Saiyan berharap Kejati tidak main-main dalam menangani kasus korupsi, termasuk dugaan ketidakberesan dalam kasus Riam

■ Halaman 7

Kejati Dianggap

Merasap. Karena itu, ia meminta penanganan kasus megaprojek Rp 135 miliar itu dituntaskan dengan melanjutkan kembali proses hukum yang sudah dihentikan (SP3) sebelumnya.

"Kita minta Kejati memproses ulang. Kejati juga harus melakukan investigasi ke lapangan untuk meneliti kebenaran kasus ini," imbuhnya.

Kejati, lanjut Saiyan, tidak memiliki alasan untuk melanjutkan proses hukum kasus tersebut. Jika memang audit BPKP lambat, Kejati disarankan menggunakan auditor lain. "Minta

ambil alih auditnya oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan Kalbar," serunya.

Seperti diberitakan, Kejati Kalbar melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas), Arifin Arsyad beberapa waktu lalu menginformasikan sudah ada audit dari BPKP dimana salah satu kesimpulan dalam audit tersebut menyatakan belum menemukan indikasi kerugian Negara.

Atas dasar audit BPKP yang diklaim Kejati Kalbar itu, korps

Adhiyaksa tersebut menghentikan proses hukum Riam Merasap. Padahal mereka mengaku akhir tahun 2010 pernah memproses kasus ini sampai tahap pengumpulan bahan keterangan awal (pulsabak).

Soal penghentian proses hukum kasus ini memang sudah lama menyimpan tanda tanya. Morkes Effendi yang menjabat Bupati Ketapang saat proyek itu dikerjakan mengklaim tidak ada masalah dalam proyek tersebut. Namun Saiyan berpendapat lain.

..... dari halaman 1

Saiyan menilai, proyek itu sejak dari perencanaan sudah salah. "Kalau memang kendalaanya masalah listrik, kenapa dari perencanaan awal tidak dipikirkan. Berartikan ada kesalahan dalam perencanaan," yakinnya.

"Harusnya dari segi perencanaan awal sudah dilakukan study kelayakan yang menyeluruh, termasuk persoalan listrik untuk mengoperasikannya," pungkas Saiyan sembari berharap anggota DPRD Ketapang tidak tinggal diam melihat persoalan ini. (tim)